

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1. Kerangka Teori

Secara umum, risiko perbankan bersumber dari (1) Risiko terkait dengan kegiatan sektor riil dan (2) Risiko yang tidak terkait dengan kegiatan sektor riil. Risiko pembiayaan yang timbul karena kondisi perekonomian (krisis ekonomi, krisis nilai tukar, tingginya inflasi, dll) merupakan risiko yang harus ditanggung bersama, artinya kredit tersebut adalah bukan tanggung jawab peminjam semata melainkan tanggung jawab kedua belah pihak. Bahkan pihak bank tentunya harus mencadangkan biaya *expected loss* yang muncul akibat adanya kredit macet. Meskipun setiap kredit seharusnya sudah merupakan refleksi dari filsafat yang mendasari pemberian kredit.

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes, 2006). Sebagai parameter dalam menunjukkan kerugian yang dikarenakan adanya risiko kredit dapat tercermin dari besarnya NPL pada bank konvensional atau NPF pada bank syariah.

Pada banyak buku teks perbankan banyak memuat tentang pendekatan yang lazim digunakan dalam analisis kelayakan kredit, yaitu konsep 5c's. Konsep 5c's bertujuan untuk memberikan gambaran perusahaan kepada bank untuk membayar kembali pinjamannya (*willingness to pay*) serta kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya (*ability to pay*). Konsep 5c's yang dimaksud adalah : *character, capital, capacity, condition of economy, collateral*. Menurut Mahmoedin (2002), indikasi kredit bermasalah dapat dilihat dari Perilaku Rekening (*Account Attitudes*), Perilaku Laporan Keuangan (*Financial Statement Attitudes*), Perilaku Kegiatan Bisnis (*Business Activities Attitudes*), Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*), dan yang ke-lima adalah Perilaku Makroekonomi (*Economic Macro Attitudes*). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur, yakni dari pihak bank itu sendiri (kreditur), dari pihak debitur, serta diluar pihak kreditur dan debitur tersebut.

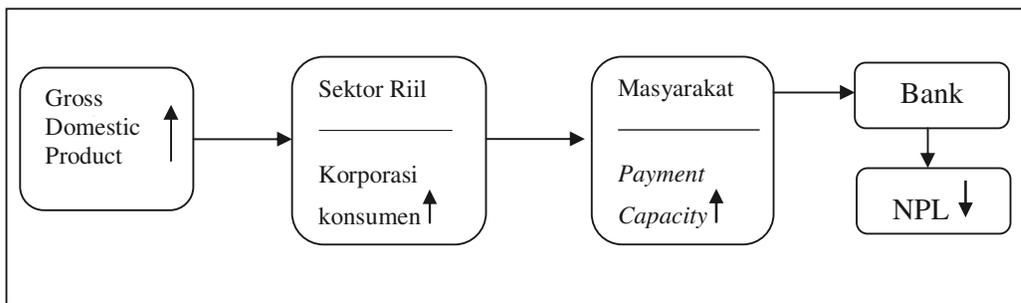
Oleh karena itu untuk membandingkan tingkat sensitifitas perbankan konvensional dan syariah, dalam hal ini adalah faktor-faktor penyebab NPL dan NPF maka diambil variabel yang umum dan tidak spesifik karena keadaan setiap nasabah dan perbankan tidaklah sama. Sehingga akan dipaparkan penjelasan teori yang berkaitan dengan keduanya yakni faktor eksternal : *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sedangkan faktor internal antara lain Kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah,serta *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing Deposit Ratio* (FDR).

### **2.1.1. Faktor *Gross Domestic Product* (GDP) Mempengaruhi Permintaan Kredit**

*Gross Domestic Product* (GDP)/ Produk Domestik Bruto digunakan untuk mengukur semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Komponen yang ada dalam GDP yaitu pendapatan, pengeluaran/investasi, pengeluaran pemerintah dan nilai selisih ekspor-impor.

Berbagai buku teks banyak menjelaskan pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap permintaan kredit. Ketika terjadi resesi ekonomi (terlihat dari penurunan GDP), maka permintaan barang dan jasa menurun. Pada kondisi resesi, perusahaan akan memperkirakan akan terjadi penurunan permintaan barang dan jasa sehingga berdampak pada penurunan penjualan atau pendapatan. Hal ini berlanjut pada penurunan laba perusahaan. Pengeluaran biaya investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan akan melebihi perkiraan arus pendapatan masuk di masa yang akan datang, akibat kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan. Dengan kata lain *Net Present Value* (NPV) akan cenderung negatif. NPV negatif ini pada akhirnya akan mempengaruhi perusahaan untuk menunda permintaan kreditnya kepada bank. Sebaliknya dalam ketika perekonomian mengalami *booming* atau GDP mengalami pertumbuhan, permintaan barang dan jasa akan mengalami peningkatan. Pada kondisi ini perusahaan memperkirakan akan memperoleh NPV positif, sehingga akan mempengaruhi perusahaan untuk mengajukan kredit / pembiayaan (Djaman, 2005).

Dalam kaitannya dengan kredit macet, dalam kondisi resesi dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini dapat menyebabkan bertambahnya *outstanding* kredit non lancar (NPL).



Sumber : Djaman, D. S. (2005)

Gambar 2.1. Mekanisme Pengaruh Perubahan GDP terhadap NPL

Berdasarkan tulisan Davis dan Zhu dalam Yuyus (2005), antara lain mengemukakan bahwa pertumbuhan GDP mempunyai dampak terhadap kualitas pinjaman yang diberikan oleh perbankan. Lebih jauh dikemukakan bahwa apabila suatu perekonomian mengalami penurunan dalam arti pertumbuhan GDP negatif, maka hal ini akan berdampak pada memburuknya kualitas perbankan. Fenomena seperti tersebut di atas, dapat dilihat ketika pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada menurunnya kegiatan di sektor riil (sebagian dibiayai oleh kredit bank) sehingga menyebabkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah.

### 2.1.2. Inflasi dan Kurs dalam pengaruhnya terhadap NPL

Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi dapat dikaitkan dengan *Consumer Price Index* (CPI), setidaknya keduanya mengukur dari subjek yang sama, yakni harga. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab perubahan laju inflasi yang bersifat permanen adalah interaksi antara ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi, jumlah uang beredar, faktor siklus kegiatan usaha (misalnya tingkat penggunaan kapasitas produksi dan inventori), dan tekanan permintaan musiman (misalnya hari raya keagamaan, musim panen, dan dimulainya tahun ajaran baru).

Pada umumnya, pihak yang bertanggung jawab dalam pencatatan statistik perekonomian suatu negara menggunakan *Consumer Price Index* (CPI) dan *Producer Price Index* (PPI) sebagai pengukur tingkat inflasi. Akan tetapi, kedua metode pengukuran tersebut memiliki kelemahan, antara lain karena metode ini menggunakan kumpulan yang mewakili sebuah *subset* keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi

oleh keseluruhan perekonomian, maka index harga tersebut tidak merefleksikan secara akurat seluruh perubahan harga yang terjadi. Selain itu CPI dan PPI juga kurang dapat mengakomodasikan barang dan jasa yang baru diciptakan walaupun kelompok *subset* barang dan jasa yang dipakai sebagai pengukur pada CPI dan PPI itu selalu direvisi dari waktu ke waktu. Atas dasar itu, inflasi diukur atas *implicit gross domestic product deflator* /GDP Deflator (S. E. Landsburg dalam Karim, 2007). Namun dalam penelitian ini menggunakan CPI sebagai index pengubah GDP nominal menjadi riil.

Ledakan inflasi pada periode Januari hingga Oktober 2005 mencapai 15,6 persen dan inflasi tahunan ( *year on year* ) menjadi 17,9 persen telah menambah rumitnya perekonomian dan meningkatkan angka kesengsaraan rakyat Indonesia. Inflasi dua digit ini dipicu oleh melambungnya harga minyak dunia, yang telah terbukti merupakan peristiwa yang banyak mengacaukan perekonomian dunia selama beberapa dekade terakhir sehingga banyak menimbulkan persoalan (Mankiw, 2004). Bahkan dampak inflasi yang dirasakan masyarakat miskin jauh lebih besar dibanding dengan angka inflasi itu sendiri. Masyarakat golongan bawah dan berpendapatan tetap akan menanggung beban inflasi dengan turunnya daya beli mereka. Lalu pemerintah untuk mengendalikan inflasi -salah satunya- menggunakan instrumen sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang naik menjadi 12,75%. Selanjutnya *return* dan bunga pinjaman bank juga turut naik.

Bersamaan dengan itu nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika (USD) dan valuta asing lainnya merosot (depresiasi). Hal ini tentu saja menjadi pemicu utama peningkatan inflasi. Situasi ini secara langsung berimbas terhadap pengelolaan bank. Diawali dengan kenaikan harga secara umum, kemudian diikuti dengan berkurangnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan penurunan penjualan dan laba perusahaan akan berdampak kepada kemampuan mengembalikan kewajiban yang dimiliki oleh debitur ditambah dengan kebijakan pemerintah.

Inflasi dalam sistem ekonomi kapitalis merupakan bagian dari siklus ekonomi dan akan dialami oleh setiap negara, hanya saja setiap negara memiliki tingkat inflasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu sebenarnya akar munculnya inflasi adalah Faktor Internal Substansial yaitu faktor yang muncul dari kebijakan-kebijak ekonomi yang lahir sistem ekonomi kapitalis, yaitu: Pertama, Bunga Bank (Riba) dan berkembangnya sektor non riil yaitu bursa Efek dan perangkat pendukungnya adalah sebab utama munculnya krisis finansial, karena dengan bunga mengakibatkan keputusan investasi tidak terkait langsung dengan sektor riil baik barang maupun jasa sehingga mengakibatkan pertumbuhan uang

akan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor riil. Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi pertumbuhan sektor riil inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi karena mengakibatkan daya beli uang selalu menurun, dan kecenderungan pemberian pinjaman secara berlebihan.

Kedua, Sistem moneter kapitalis menyebabkan inflasi karena 2 hal; pertama, fungsi uang bukan hanya sebagai alat tukar tetapi uang sekaligus sebagai komoditas yang diperdagangkan dalam bursa saham dan bursa valuta asing serta ditariknya bunga (riba) dalam transaksi tersebut. Akibatnya, setiap transaksi mengakibatkan jumlah uang bertambah tanpa diikuti dengan peningkatan jumlah barang atau jasa. Kedua, Sistem mata uang yang menggunakan *flat money* yaitu mata uang yang tidak didukung oleh emas atau perak akan tetapi uang tersebut berlaku hanya atas dasar jaminan pemerintah melalui undang-undang, akibatnya Nilai Intrinsik uang (nilai bahan baku uang) sangat berbeda dengan nilai nominal (nilai yang tertera dalam mata uang tersebut, misalnya uang dengan nilai Rp 100.000 (nilai nominal) maka bahan bakunya (nilai intrinsiknya) tidak akan lebih dari Rp 10.000, akibatnya perbedaan antara nilai nominal uang dan nilai intrinsiknya secara *inheren* akan memunculkan inflasi .

Selain itu faktor lain yang menjadi penyebab kredit macet adalah Faktor diluar pihak kreditur dan debitur, misalnya situasi ekonomi yang negatif, yakni

- (a) Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif, yakni akibat tidak ada lagi batas negara maupun pulau. Barang-barang luar negeri dengan bebasnya masuk bersaing dengan barang lokal. Barang impor tersebut diproduksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga barang lokal kalah bersaing sehingga mengakibatkan macetnya angsuran pokok pinjaman yang telah diambil.
- (b) Perubahan Kurs Mata Uang. Perubahan ini sangat berpengaruh pada kelancaran usaha nasabah. Jika nilai rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta asing, dan jika usaha tersebut dijalankan menggunakan bahan impor, maka akan memukul usaha nasabah.

### 2.1.3. Instrumen Bunga terhadap Perkembangan Kredit

Kebijakan moneter di suatu negara diimplementasikan dengan menggunakan instrumen moneter (suku bunga atau agregat moneter) yang mempengaruhi sasaran antara, untuk mencapai sasaran akhir, yaitu stabilitas harga atau pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter akan mempengaruhi perekonomian melalui empat jalur transmisi (Hartadi Sarwono dan Perry Warjiyo, Juli 1998, hal. 8 dalam Arifin 1998). Pertama, jalur suku bunga (Keynesian) berpendapat bahwa pengetatan moneter mengurangi uang beredar dan mendorong peningkatan suku bunga jangka pendek yang apabila *credible*, akan timbul ekspektasi masyarakat bahwa inflasi akan turun atau suku bunga riil jangka panjang akan meningkat. Permintaan domestik untuk investasi dan konsumsi akan turun karena kenaikan biaya modal sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun.

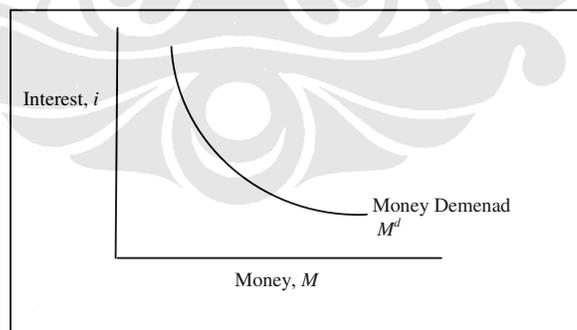
Kedua, jalur nilai tukar berpendapat bahwa pengetatan moneter, yang mendorong peningkatan suku bunga, akan mengakibatkan apresiasi nilai tukar karena pemasukan aliran modal dari luar negeri. Nilai tukar akan cenderung apresiasi sehingga ekspor menurun, sedangkan impor meningkat sehingga, transaksi berjalan (demikian pula neraca pembayaran) akan memburuk. Akibatnya, permintaan agregat akan menurun dan demikian pula laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Ketiga, jalur harga aset (monetarist) yang berpendapat bahwa pengetatan moneter akan mengubah komposisi portfolio para pelaku ekonomi (*wealth effect*) sesuai dengan ekspektasi balas jasa dan risiko masing-masing aset. Peningkatan suku bunga akan mendorong pelaku ekonomi untuk memegang aset dalam bentuk obligasi dan deposito lebih banyak dan mengurangi saham.

Keempat, jalur kredit yang berpendapat bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui perubahan perilaku perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabah. Pengetatan moneter akan menurunkan *net worth* pengusaha. Menurunnya *net worth* akan mendorong nasabah untuk mengusulkan proyek yang menjanjikan tingkat hasil tinggi tetapi dengan risiko yang tinggi pula (*moral hazard*) sehingga risiko kredit macet meningkat. Akibatnya, bank-bank menghadapi *adverse selection* dan mengurangi pemberian kreditnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi melambat.

Dengan demikian suatu otoritas moneter mempunyai pengaruh yang penting, walaupun secara tak langsung, terhadap arah (*trend*) tingkat harga, *ouput*, dan nilai tukar

uang suatu negara. Otoritas moneter atau bank sentral, melakukan hal tersebut melalui kemampuannya mengendalikan penawaran uang dan kredit bank, serta melalui pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga, arus kredit, dan perkembangan sektor finansial pada sebuah perekonomian. Pengaruh spesifik yang lain adalah kemampuan bank sentral untuk mengendalikan jumlah maksimum suku bunga yang dapat dibayarkan terhadap jumlah simpanan tertentu kepada bank-bank dan menentukan proporsi saham yang dapat dibeli melalui kredit (Karim, 2007). Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Transmisi suku bunga berjalan dapat mengacu pada suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia), misalnya berpengaruh kepada suku bunga deposito dan kredit. Kenaikan suku bunga SBI menyebabkan sebagian uang yang beredar di masyarakat masuk ke dalam otoritas moneter, sehingga berdampak pada meningkatnya suku bunga di pasar uang antar bank, karena perbankan memerlukan *cash flow* untuk memelihara likuiditasnya. Situasi seperti itu, menyebabkan perbankan harus menata ulang terhadap struktur harga jual (bunga) yang diberikan kepada masyarakat (konsumen dan produsen), sehingga pemasukan menjadi meningkat. Dari sisi konsumen (deposan) meningkatnya suku bunga akan menyebabkan dana pihak ketiga (DPK) perbankan meningkat. Dari sisi debitur (produsen dan perorangan), meningkatnya suku bunga menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban kepada bank menjadi meningkat.



Sumber : Blanchard (1997)

Gambar 2.2. Kurva Permintaan Uang (*LM Curve*)

Peningkatan tersebut, akan dibarengi dengan menurunnya kemampuan sebagian nasabah debitur untuk memenuhi kewajibannya sehingga membawa konsekuensi terhadap rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) menjadi turun (Yustian, 2005). Hal

ini dapat dilihat pada Gambar 2.2, bahwa suku bunga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar, kaitan dalam hal ini adalah permintaan kredit.

SBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan. SBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtangankan (*negotiable*). SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) atau pembelian/ penjualan lepas (*outright*).

Bagi bank konvensional, pada saat krisis, adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan bunga pinjaman. Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas bank dan tidak terjadi penurunan laba, atau bahkan *negative spread*. Akan tetapi dalam bukunya, Sipahutar (2007) menyatakan dalam hal kebijakan suku bunga tinggi dan *one debtor one project concept* harus diakui bahwa kebijakan ini membawa dampak bagi minimalisasi ekspansi kredit dan menurunnya kualitas kredit. Namun demikian kalau dicermati secara lebih menyeluruh, dampak kebijakan suku bunga tinggi hanya berpengaruh besar terhadap ekspansi kredit dan kurang berdampak pada terhadap penurunan kualitas kredit.

Dari sisi perbankan syariah, Kushartanto dalam Yustian (2005) menyatakan bahwa tingginya suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia meskipun akan menaikkan suku bunga bank konvensional, namun demikian tidak akan berpengaruh banyak terhadap bank syariah.

Dalam papernya, Ali Sakti (2006) menjelaskan Setidaknya bunga bank memiliki andil pada krisis yang terjadi sepanjang abad 20, seperti terlihat pada kronologi krisis yang coba di susun oleh Roy Davies dan Glyn Davies (1996) dalam buku mereka *a history of money from ancient times to the present day*. Menurut mereka telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan). Dari data mereka ini dapat dianalisa sebab dan bagaimana krisis-krisis tersebut dapat terjadi. Selain itu berdasarkan data Davies pada periode tahun 1900 – 1940 banyak terjadi krisis perbankan (di Amerika Eropa dan Asia) akibat tidak ada regulasi yang baik di sektor perbankan, sehingga sektor ini mendorong terciptanya uang melalui proses kredit (bunga bank) melebihi standard emas (*gold standard rezime*) yang menjadi rezim moneter saat itu. Akhirnya tahun 1915 rezim emas runtuh, sehingga oleh Francisco LR Batiz dan Luis R

Batiz (1985), periode 1915-1940-an disebut sebagai periode kekacauan moneter (*monetary chaos*). Akhirnya rezim emas digantikan oleh rezim *fixed exchange rate* yang dimulai ketika terjadi kesepakatan Bretton Woods pada bulan Juli 1944. Pada ketika itu juga dibentuklah *International Monetary Fund (IMF)*, dengan tujuan memecahkan masalah keuangan negara-negara yang terkena krisis moneter. Namun kesepakatan Bretton Woods ini runtuh juga pada tahun 1971 disebabkan dunia tak mampu lagi menjaga rezim nilai tukar tetap akibat (sekali lagi) perkembangan yang spektakuler di pasar moneter dunia. Apalagi spekulasi pada pasar keuangan mulai menggeliat ketika itu. Maka sejak 1973 sektor moneter dunia didominasi oleh spekulasi dengan (tentu saja) bunga sebagai variabel utama. Dan semenjak awal 1980-an negara-negara berkembang menjadi korban sistem spekulasi dan hutangnya konvensional. Dimulai tahun 1980 Polandia mengalami krisis hutang, diikuti Mexico tahun 1982 dan 1994, Korea dan negara-negara Asia Tenggara (Thailand, Malaysia dan Indonesia) tahun 1997, Rusia dan Brazil tahun 1998, dan Argentina pada tahun 1999.

Penggunaan bunga memakai asumsi nasabah selalu untung, sehingga dilakukan penarikan bunga dari *outstanding* kredit debitur. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Pada ayat-Nya Allah menegaskan bahwa hanya Dialah yang mengetahui apa yang akan terjadi kelak, dan manusia tidak bisa memastikan. Kaitannya dengan hal ini adalah, penerapan bunga yang tidak pada tempatnya dibebankan kepada peminjam.

*"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".(Qs. Luqman:34)*

#### 2.1.4. Faktor Ekspansi Kredit mempengaruhi Peningkatan Kredit Bermasalah

Berger dan Udell dalam Saurina (2005) menyatakan sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian negara, *loan officer* menjadi kurang terlatih dalam menghindari debitur beresiko tinggi. Argumen ini disebabkan oleh *imperfect information* antara shareholder dan pihak bank. Hal ini diperparah dengan meningkatnya persaingan antar bank. Persaingan yang kuat dapat mengikis bunga serta marginal pendapatan kotor dari pinjaman dan dana pihak ketiga (DPK) semakin tipis. Untuk mengatasi jatuhnya nilai profit ini, pihak bank meningkatkan pertumbuhan aset, misalnya dalam hal penyaluran pinjaman sehingga dapat menutup biaya dari portofolio pinjaman di masa depan. Hal ini tidak langsung menimbulkan kredit bermasalah, sehingga justru ekspansi semakin ditingkatkan. Ekspansi ini memuaskan pihak bank (meningkatkan keuntungan, status dan pamor yang baik).

Pada saat bank meningkatkan penyaluran kredit dengan *screening* yang diterapkan lemah, maka dapat menyebabkan *asymetric information* antara debitur dan pihak bank. Kemudian ekspansi bank mencapai titik jenuh, dan penyaluran kredit telah menurunkan modal, dan pada saat itu pula *monetary shock* akan memperparah penurunan keuntungan bank, penurunan rasio modal dan penurunan availabilitas penyaluran pinjaman ke nasabah rumah tangga dan perusahaan.

Sipahutar (2007) menyatakan, pada saat industri perbankan ekspansif, banyak kritik yang dilontarkan. Pada saat industri perbankan tidak kunjung mengucurkan kreditnya, banyak juga kritik yang dilontarkan. Terkesan seolah-olah institusi perbankan merupakan institusi yang selalu layak menjadi sasaran kritik, yang tidak hanya datang dari kalangan elit, tetapi juga pengusaha maupun intelektual. Semua kalangan sangat mungkin untuk melakukan kritik, terutama pada saat berbicara tentang kepedulian perbankan dalam mengakomodir kebutuhan pembiayaan bisnis. Berbicara tentang fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi seolah-olah tidak ada habisnya. Sebagai lembaga finansial, peranan perbankan memang sangat strategis. Bank adalah motor penggerak perekonomian. Situasi ini mungkin dapat disebabkan oleh hal berikut, perbankan yang mempunyai jumlah pinjaman lebih besar dapat menyebabkan potensi tingginya risiko kredit yang harus ditanggung, sehingga pada akhirnya juga akan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Hal inilah yang membuat perbankan seolah ragu-ragu dalam menyalurkan kreditnya dan lebih memilih instrumen BI sebagai tempat menampung aktiva-nya.

Produk pinjaman pada bank konvensional umumnya mencakup kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif; sedangkan produk pembiayaan pada bank syariah mencakup Musyarakah, Mudharabah serta Murabahah.

### **2.1.5. Loan Deposit Ratio (LDR) Mempengaruhi Kredit Macet**

Sebagai salah satu alat ukur kinerja perbankan, LDR sangat memegang peranan untuk mengetahui sejauh mana perbankan telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang di satu sisi melakukan penghimpunan dana dan di sisi lain harus juga menyalurkan dana untuk membiayai sektor-sektor ekonomi. Semakin tinggi LDR maka semakin baik pula dampaknya dalam menggerakkan roda ekonomi nasional karena LDR dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Mustahil perekonomian bisa maju jika tidak didukung oleh keterlibatan penuh dari dunia perbankan.

Namun disisi lain Sipahutar (2007) menggambarkan sebagai berikut : Secara spesifik kebijakan tambahan Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan piranti Bank Indonesia (BI) untuk kontraksi moneter dengan mengurangi jumlah uang beredar. Dalam kasus normal, semestinya kebijakan ini akan berpengaruh kepada menurunnya kemampuan perbankan untuk ekspansi kredit sebagai konsekuensi dari menurunnya likuiditas perbankan. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bahwa LDR perbankan secara umum hingga 5 tahun terakhir masih di bawah 65%. Artinya adalah masih cukup ruang yang tersedia untuk ekspansi kredit melalui peningkatan LDR. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah haruskah BI mengorbankan kebijakan stabilisasi moneter dengan merestui peningkatan NPL seperti yang berlangsung tahun 2005 dimana ekspansi kredit melahirkan NPL yang sangat besar.

Lebih jauh Ekonom Joseph E. Stiglitz pernah menyatakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki peluang untuk mengalami krisis ekonomi gelombang kedua sebagai efek tidak berjalannya fungsi intermediasi perbankan

### **2.1.6. Pembiayaan Bank Syariah**

Islam mengakui peran modal sebagai suatu faktor produksi. Akan tetapi, karena keuntungan hasil produksi dapat ditentukan hanya sesudah dilakukan perhitungan terhadap semua ongkos, dan mungkin saja bisa bernilai positif atau negatif, Islam melarang suatu laju keuntungan positif yang ditentukan di depan berupa bunga. Islam menghendaki bagi hasil dalam suatu cara yang adil, dengan melibatkan penyedia dana

untuk berbagi kerugian, jika ada, sesuai dengan proporsi modalnya dalam aktivitas bisnis, jika ia ingin mendapatkan saham dalam keuntungan dari modalnya (Chapra, 2000:32).

Bertolak dari hal di atas, Ali Sakti dalam papernya memaparkan kebijakan yang ada pada saat ini bergerak di bawah sistem kredit (*interest rate*) yang cenderung mengaburkan suatu kebijakan dari sasarannya, sehingga kebijakan-kebijakan baik sekalipun akan mandul ketika pengaruh sistem kredit dengan bunganya memberikan fenomena yang tak terduga. Dengan sistem moneter konvensional yang semakin kompleks dan saling bergantung, apalagi semakin dirumitkan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, pergerakan variabel-variabel moneter semakin susah untuk dikontrol atau dikendalikan. Yang pada akhirnya para pelaku pasar menjadi tunduk pada kecenderungan-kecenderungan pasar, namun pada saat yang sama mereka terus mendorong kuatnya kecenderungan pasar tadi dengan memperkuat sistem kredit dan mekanisme bunga (Ali Sakti, 2006). Sementara itu G.K. Helleiner dalam Chapra(1985), membahas bagaimana negara-negara maju memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan institusi keuangan internasional, akibat dari terkonsentrasinya kekayaan yang menyebabkan dominasi politik dan ekonomi. Konsentrasi kekuatan ekonomi yang didorong oleh sistem kredit dengan bunganya, menciptakan kondisi ketidakadilan dalam kebijakan ekonomi global. Kekuatan berupa *voting powers* negara-negara maju atas kebijakan yang ada dalam institusi keuangan dunia adalah sebagai berikut: 24% di WTO, 48% di IDB, 60% di ADB, 61% di WB dan 62% di IMF.

Prinsip yang membedakan bank syariah adalah terutama dalam hal pengambilan keuntungan, yakni bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti bunga (*interest*). Dalam ekonomi syari'ah sistem bagi hasil yang kemudian menjadi jantung dari sektor 'moneter' Islam, bukan bunga. Karena sesungguhnya, bagi hasil sesuai dengan iklim usaha yang memiliki kefitrahan untung atau rugi. Tidak seperti karakteristik bunga yang memaksa agar hasil usaha selalu positif. Jadi penerapan sistem bagi hasil pada hakikatnya menjaga prinsip kemashlahatan umat dan keadilan tetap berjalan dalam perekonomian. Karena memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam perekonomian. Selain itu jika sistem perhitungan *return* pada Bank Konvensional sangat tergantung pada kebijakan moneter perbankan, maka hal ini berbeda dengan sistem perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah, yang menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Ekonomi Islam tidak mengenakan bunga dalam sistemnya, melainkan menggunakan nisbah yang diperoleh dari *Expected Profit Rate* (EPR). Di kalangan ekonom Islam tercatat beberapa pakar yang melihat bahaya bunga sebagai motor perekonomian, seperti Muslehuddin (1974), Qureshi (1979), Kahf (dalam Khurshid, 1981), Siddiqi (1981), Chapra (1985 dan 1996), Allais (1993), Choudry dan Mirakhor (1997). Sementara itu beberapa ekonom konvensional menyoroti bagaimana bunga memiliki andil yang sangat besar pada masalah perangkap hutang (*debt trap*) yang sudah membelenggu dunia (seperti yang telah dibahas sebelumnya), tidak hanya negara-negara ketiga tapi juga negara-negara maju. Ekonom-ekonom tersebut diantaranya; Rowbotham (1998), Barberton dan Lane (1999), Olivier Jeanne (2000), Robin Hahnel (2000). Barberton dan Lane berpendapat bahwa sistem finansial barat sejak awal 1970-an sudah sangat tergantung dengan hutang (*debt addiction*). Ekspansi besar dari *public debt* tidak dapat selalu diasosiasikan dengan peningkatan pada kinerja ekonomi. Karena peningkatan hutang tidak diikuti dengan peningkatan *economic returns* pada tahun-tahun setelahnya. Barberton dan Lane bahkan memprediksikan sebuah krisis yang akan memukul sistem keuangan barat hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan pasar kredit dan modal yang berkembang begitu cepat dengan sedikit transparansi dan pertanggungjawaban (Ali Sakti, 2006).

Salah satu produk pembiayaan dalam Islam yaitu *Mudharabah* atau *qiradh*, termasuk dalam kategori *syirkah*. Dalam pelaksanaannya, Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal/ financier*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola/*entrepreneur*. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ahmad Asy-Syabarsi, al-Mu'djam al-Iqtisad al-Islami dalam tesis Darmawan). Pembiayaan demikian tidak saja akan mendistribusikan keuntungan pada investasi total antara penyedia dana dan pelaku bisnis secara adil, tetapi juga akan mentransfer saham risiko investasi yang *fair* kepada penyedia dana dan bukan meletakkan keseluruhan beban pada pundak pelaku bisnis (Chapra, 2000). Keadaan demikian membuat penyedia dana lebih berhati-hati dalam mengevaluasi prospek bisnis dan lebih waspada dalam

menyediakan pembiayaan. Dengan demikian, ekspansi bisnis sangat erat berkaitan dengan distribusi kepemilikan dan kontrol.

Dengan sistem bagi hasil ada interaksi yang seimbang ketika terjadi keuntungan maupun kerugian. Ketika profit yang tinggi diperoleh, tidak semata dinikmati oleh pengusaha saja, akan tetapi dinikmati oleh pihak *financier*. Begitu pula ketika pengusaha rugi, risiko pun ditanggung oleh pemilik dana. Distribusi kekayaan akan lebih merata dan efisien, tidak seperti pada sistem bunga, sepenuhnya risiko ditanggung oleh debitur dan bank menjamin dirinya sendiri dengan laju pengembalian yang ditentukan di depan.

Selain itu penanaman spirit dalam Islam pada semua tingkatan masyarakat akan mengurangi klaim pada sumber-sumber daya, termasuk cadangan devisa, dan akan mendorong tabungan dan formasi kapital. Hal itu juga akan mengurangi permintaan kredit (bukan saja untuk tujuan-tujuan konsumsi pamer, tetapi juga juga impor, produksi, dan distribusi barang-barang demikian) dan karena itu adalah ekspansi moneter yang tidak perlu. Dengan sikap seperti ini tentu saja pembiayaan akan lebih selektif diberikan. Pembiayaan dialokasikan untuk kegiatan produktif yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan sudut pandang yang lebih luas, ketergantungan terhadap produk impor, terutama untuk penggunaan konsumtif mengecil, sehingga nilai tukar mata uang akan lebih stabil dan inflasi tidak terlalu tinggi. Namun hal ini sulit dirasakan dampaknya jika sistem syariah masih setengah-setengah diterapkan dan hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan sistem perekonomian negara.

Para penulis ekonomi Islam umumnya menggariskan bahwa Islam tidak mengenal perbedaan antara sektor moneter dan sektor riil. Sektor moneter merupakan bayangan atau cermin dari sektor riil. Jika sektor riilnya tidak ada maka tidak ada sektor moneter. Oleh karena itu penciptaan produk finansial yang terlepas dari produk riil akan mengakibatkan derivasi yang menyebabkan timbulnya *bubble economics* (Hakim dalam Muhammad, 2005).

Namun begitu perbankan syariah masih menuai kritik yang tajam. Produk dengan akad jual beli membawa eksese pada penentuan tingkat harga. Tingkat keuntungan yang ditentukan untuk produk jual beli, akhirnya menjadi *cost of fund* untuk semua produk, termasuk produk bagi hasil. Dan hal itu dihitung dengan *per annum*. Maka tidak heran jika ada *Mudharabah* dengan bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah setara dengan 20% *per annum*. Jika nasabah mendapat keuntungan lebih dari itu, ia hanya membayar setara itu. Padahal *mudharabah* adalah produk bagi hasil yang kondisi pendapatannya

tidak *fixed*, tergantung situasi bisnis (Hakim dalam Muhammad, 2005). Hal ini memungkinkan timbulnya potensi pembiayaan macet dalam perbankan syariah.

Dalam bukunya, Chapra (2000) memaparkan : sejumlah keberatan muncul terhadap perekonomian bebas bunga. Keberatan ini didasarkan kepada dua asumsi. Asumsi pertama yaitu bahwa dalam ketiadaan bunga, dana pinjaman tersedia secara gratis sehingga menghasilkan inefisiensi sumber daya langka dan merugikan masyarakat. Asumsi kedua adalah suku bunga yang berbentuk uang telah menjadi sebuah mekanisme yang baik dalam alokasi sumber daya secara efisien. Asumsi pertama tidak berdasar karena dana-dana tidak akan didapat secara gratis dalam sebuah sistem Islam. Mereka akan didapatkan dengan ongkos dan ongkos itu adalah “berbagi” dalam keuntungan. Dengan demikian laju keuntungan akan menjadi sebuah kriteria bagi alokasi sumber daya dan sebagai mekanisme untuk menyamakan permintaan dan penawaran. Makin besar keuntungan atau *ex-ante* dalam suatu bisnis, makin besar penawaran dalam bisnis tersebut. Hal demikian diharapkan akan membantu memperkuat disiplin yang lebih besar dalam investasi melalui evaluasi proyek yang lebih berhati-hati, dengan membuang semua proyek yang tidak efisien dan tidak produktif. Selain itu untuk memperkecil risiko, bank syariah harus mendistribusikan dananya ke berbagai bidang pembiayaan.

Asumsi kedua juga tidak benar yang menyatakan suku bunga telah menjadi mekanisme efisien untuk alokasi sumber daya. Banyak bukti yang mengatakan sebaliknya, bahwa optimalitas pareto dalam alokasi sumber-sumber daya hanya ada dalam dunia mimpi model equilibrium pasar bersaing sempurna. Ralph Turvey, seperti yang dikutip oleh Chapra (2000), mengatakan *suku bunga tidak berdaya dan merasa bahwa laju suku bunga tidak relevan bagi keputusan-keputusan investasi dan harus diganti dengan harga peralatan yang ada (atau harga-harga saham)*. Selain itu penerapan bunga seringkali menyebabkan bisnis besar semakin besar, sehingga akan menimbulkan kekuatan monopoli, karena bisnis kecil tidak mampu menjaga liquiditasnya ketika suku bunga meningkat.

### **2.1.7. Shock Perekonomian**

Lebih dari dua dekade, sejumlah Negara telah mengalami krisis perbankan setelah masa pertumbuhan ekonomi kuat, secara cepat asset meningkat dan peningkatan kredit secara signifikan. Selama masa pertumbuhan kuat, risiko nampaknya terlihat rendah, tetapi pada kenyataannya ketidakseimbangan serius sedang terbangun. Lalu terbukanya ketidakseimbangan ini terjadi belakangan karena terjadinya tekanan keuangan dan makroekonomi. Kemudian yang terjadi adalah melemahnya kembali perekonomian negara.

Sektor perbankan telah mengidap berbagai kelemahan sebelum terjadinya krisis berkepanjangan seperti tercermin pada besarnya jumlah kredit macet pada sejumlah bank. Dengan terjadinya krisis yang mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan ketat, disamping serbuan *rush* berulang-ulang, sektor perbankan menjadi semakin terpuruk karena disintermediasi perbankan sudah terjadi sejak akhir 1997 dan kualitas aktiva produktif juga memburuk. Hal ini menunjukkan risiko dibangun pada saat *booming*, tetapi bahan-bahannya berasal pada saat *downturn*. Dari data yang ada perbankan dapat saja mencatat siklus ulangan yang terjadi, untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan perbankan.

Sehingga selain meneliti faktor-faktor penyebab NPL dan NPF, penelitian ini juga ingin memastikan apakah NPL dan NPF yang terbentuk kini merupakan akibat dari *shock*/ gejala perekonomian dari masa sebelumnya.

## **2.2. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian mengenai kredit macet dan variabel makroekonomi sudah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang. Berikut penulis tampilkan beberapa kajian mengenai NPL, kredit macet, dalam kaitannya dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

### **2.2.1. Faktor-faktor penyebab NPL dan NPF dari sisi Makroekonomi**

Tahun 2005 merupakan tahun yang sulit dan penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Beberapa indikator ekonomi makro penting yang melandasi penetapan sasaran inflasi dan arah kebijakan Bank Indonesia di awal tahun, ternyata mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan. Berbagai permasalahan mendasar di dalam negeri yang belum tertangani dengan baik di tengah kondisi melonjaknya harga minyak

dunia dan siklus pengetatan moneter global telah berdampak buruk pada kestabilan ekonomi makro, yang tercermin dari memburuknya transaksi berjalan, melemahnya nilai tukar, dan tingginya inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen). Akibatnya, kinerja perekonomian 2005 yang sempat terakselerasi di awal tahun secara berangsur-angsur mengalami perlambatan (LPPS BI 2005).

Diskusi mengenai bagaimana hubungan sebab akibat antara *Gross Domestic Product* (GDP) dengan permintaan kredit telah berlangsung lama. Ada dua hubungan kausalitas, yaitu : pertama, rendahnya pertumbuhan kredit disebabkan rendahnya permintaan kredit oleh sektor riil, sebagai akibat penurunan GDP atau pertumbuhan GDP yang rendah. Kedua, meningkatnya pertumbuhan GDP didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit.

Mudrajad dan Suhardjono, dalam bukunya : *Teori dan Aplikasi* yang dikutip oleh Djaman (2005), memaparkan fenomena berbeda antara kondisi di Indonesia dengan beberapa negara lain. Di negara Filipina terdapat hubungan satu arah antara total kredit domestik dengan pertumbuhan ekonomi (GDP), artinya pertumbuhan kredit di dalam negeri mendorong laju pertumbuhan ekonomi Filipina. Bukti empiris di Indonesia menggambarkan sebaliknya, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia mendorong penciptaan berbagai lembaga keuangan bank dan bukan bank, termasuk mendorong laju ekspansi kredit oleh perbankan.

Peningkatan harga minyak dunia yang mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ternyata menyebabkan kegoncangan perekonomian dalam negeri, tidak luput bagi para debitur dalam negeri, NPL meningkat tajam. Penelitian yang telah dilakukan di Thailand menghasilkan kesimpulan yaitu setiap kenaikan \$1 harga minyak mentah Dubai, akan mengakibatkan penurunan 0,2% GDP Thailand, dan hal ini akan mengakibatkan kenaikan inflasi 0,3% (*The Nation Newspaper*, 2007).

Pertumbuhan kredit yang tinggi di masa lalu ternyata sejalan dengan peningkatan NPL di masa ini. Penelitian yang telah dilakukan, di antaranya dilakukan oleh J. Saurina dan G. Jimenez (2005), menggunakan tahapan sebagai berikut :

1. Menggunakan periode yang panjang dengan maksud untuk melihat 2 siklus kredit di dunia perbankan
2. Menggunakan karakteristik portfolio pinjaman, yang berfokus pada industri dan wilayah, serta agunan yang digunakan

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa variabel pertumbuhan GDP signifikan mempengaruhi NPL, bunga bernilai positif dan signifikan. Namun di atas semua itu

adalah bahwa semakin tinggi pertumbuhan kredit, maka semakin besar pula kemungkinan terjadi default pada satu tahun berikutnya, hal ini dinyatakan dengan Pertumbuhan Kredit yang bernilai positif, hal ini akan dijabarkan di bagian bawah dari tinjauan pustaka ini.

Beberapa penelitian telah menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu :

1. Pada *boom period*, ketika kredit disalurkan, maka masalah kredit mulai ditaburkan.
2. Pada saat resesi, pinjaman mulai dibatasi, dan perbankan mulai berhati-hati, baik dalam kualitas debitur maupun kondisi pinjaman. Masalah yang terjadi yaitu untuk menyadari bahwa kebijakan kredit yang salah justru terjadi di waktu yang baik, padahal prinsip kehati-hatian dibutuhkan pada saat seperti itu.

### **2.2.2. Suku Bunga / SBI dengan NPL/NPF**

Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut Supriyanto (2003) dalam tesis Lindiawatie (2007), diketahui setelah 5 tahun krisis, perbankan mulai bergairah kembali melempar kredit (rasio LDR meningkat) meskipun secara umum fungsi intermediasi belum bergairah secara optimal. Adanya gelagat penurunan suku bunga akan memberi ruang tersendiri bagi bank-bank untuk memberikan kredit.

Di sisi syariah, dari berbagai sumber media secara umum mengatakan bahwa tampaknya perubahan suku bunga tidak begitu berpengaruh terhadap bank syariah. Berdasarkan tulisan Wahyuni (2005) dalam Lindiawatie (2007), dapat dikatakan bahwa meskipun kondisi ekonomi makro sepanjang tahun 2005 mengalami perkembangan ke arah yang kurang menguntungkan, misalnya suku bunga SBI cenderung naik, yaitu 7,42% menjadi 11% di posisi Oktober, dan di posisi November menyentuh angka 12,75%, kondisi bank syariah tetap stabil.

Sementara itu, menurut Hidayat (2005) dalam Lindiawatie (2007) mengatakan bahwa meningkatnya suku bunga bisa berdampak negatif terhadap pendanaan, mengingat sebagian besar pasar perbankan di Indonesia adalah rasional. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Amril (2005) dalam Lindiawatie (2007) bahwa kenaikan suku bunga tidak hanya berdampak terhadap bank konvensional tetapi perbankan syariah di Jawa Timur juga terimbas kenaikan suku bunga tersebut.

Penelitian yang dilakukan Asy'ari (2006) menggunakan variabel suku bunga pinjaman, bonus SWBI serta jumlah uang beredar dalam menentukan pembiayaan yang

diberikan. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Pada akhir penelitian, Asyumi menyimpulkan faktor dana pihak ketiga dan suku bunga rata-rata pinjaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan faktor bonus SWBI dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh secara signifikan meskipun terdapat korelasi yang signifikan.

Di Amerika Serikat (AS), sebuah studi terhadap dua ratus perusahaan nonfinansial terbesar yang merupakan enam puluh persen dari semua perusahaan manufaktur dan karenanya menikmati kekuasaan politik yang signifikan, telah memperlihatkan bahwa *"kekuasaan sesungguhnya berada di tangan para bankir yang merupakan pemegang utama saham perusahaan atau kreditur dari perusahaan-perusahaan besar modern"* (D.M Kotz dalam Chapra, Umer, 2000). Laporan Patman dan Laporan Komisi Bursa dan Sekuritas juga menghasilkan konklusi yang serupa. Perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang memiliki kontrol riil pada aset-aset ini jelas memiliki profit yang lebih kecil dibandingkan profit bank.

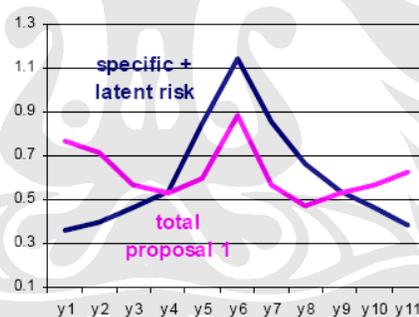
### **2.2.3. Ekspansi Kredit, GDP, siklus ekonomi dan NPL**

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada pendapat bahwa pertumbuhan kredit berbanding lurus dengan peningkatan NPL. Berdasarkan perkembangan teori dan pengalaman, terdapat bukti adanya hubungan nyata antara laju penyaluran kredit dengan NPL yang kemudian timbul.

Pada papernya, Saurina (2005) menunjukkan adanya hubungan antara penyaluran kredit dengan risiko kredit. Semakin cepat laju penyaluran kredit berbanding lurus dengan kenaikan NPL. Berdasarkan perkembangan teori dan pengalaman yang telah ada, terdapat bukti adanya hubungan nyata antara laju penyaluran kredit dengan NPL yang kemudian timbul. Penelitian ini menghasilkan bahwa ada hubungan antara laju penyaluran kredit dan risiko kredit. Semakin cepat laju penyaluran kredit maka akan berbanding lurus dengan kenaikan NPL. Pinjaman yang diberikan ketika *boom period* akan menyebabkan kemungkinan terjadi *default* lebih tinggi dibandingkan pada saat krisis. Akhirnya diperoleh kenyataan bahwa persyaratan jaminan ketika *boom period* lebih longgar, keadaan sebaliknya terjadi pada saat resesi. Penggunaan data tahun-tahun sebelumnya pada model tersebut dikarenakan dampak yang sekarang muncul disebabkan oleh peristiwa masa yang lalu (dibutuhkan waktu untuk menimbulkan efek).

Saurina berkesimpulan tingkat pertumbuhan kredit selama 4 tahun terakhir secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat NPL. Tingkat pertumbuhan kredit selama 3 tahun terakhir juga positif namun tidak signifikan. Hal ini juga menunjukkan penyaluran kredit saat *booming*, juga akan mempengaruhi tingkat NPL di masa yang akan datang. Dan dikarenakan masalah kredit mempunyai sifat yang persisten, maka variabel NPL periode sebelumnya dimasukkan sebagai variabel independen.

Pada penelitiannya, untuk menjelaskan cara kerja pencadangan, Saurina memberikan ilustrasi siklus kredit sebagai berikut : Disimulasikan siklus ekonomi dan kredit adalah 11 tahun. Pada dua tahun pertama, ekonomi tumbuh secara maksimal, yang dicirikan dengan tingginya pertumbuhan kredit dan rendahnya pencadangan spesifik (NPL rendah). Tahun ke-3 pertumbuhan kredit mengalami penurunan, dan NPL meningkat yang juga meningkatkan pencadangan bank. Pada tahun ke-6 didapati kondisi pencadangan maksimal, dan minimum pertumbuhan kredit. Tujuh tahun kemudian perekonomian membaik dan pencadangan menurun.



Sumber : Saurina (2005)

Gambar 2.3. Siklus Kredit

Model Saurina (2005) mengenai rasio pinjaman merupakan fungsi dari variabel makro dan mikro (*balance sheet*). Model tersebut membuktikan ada korelasi positif antara pertumbuhan kredit di masa lalu dengan masalah kredit yang dihadapi sekarang.

Lebih lanjut lagi penelitian Saurina menampilkan persamaan keterkaitan NPL dengan situasi perbankan dan makroekonomi, seperti pertumbuhan GDP, suku bunga serta pertumbuhan kredit seperti yang ditampilkan berikut ini :

Persamaan Saurina et al (2005):

$$NPL_{it} = \alpha NPL_{it-1} + \beta_1 GDPG_t + \beta_2 GDPG_{t-1} + \beta_3 RIR_t + \beta_4 RIR_{t-1} + \delta_1 LOANG_{it-2} + \delta_2 LOANG_{it-3} + \delta_4 LOANG_{it-4} + \chi_1 HERFR_{it} + \chi_2 HERFI_{it} + \theta_1 COLIND_{it} + \theta_2 COLFIR_{it} + \omega SIZE_{it} + \eta_i + \varepsilon_{it} \quad (2.1)$$

**Keterangan :**

NPL<sub>it</sub> : Rasio kredit macet per total kredit untuk bank i ditahun t, penelitian Saurina menggunakan  $\ln(NPL_{it}/(100-NPL_{it}))$ , agar tidak membatasi variasi nilai variabel

GDPG : *Gross Domestic Product Growth*

RIR : *Real Interest Rate*

LOANG : *Loan Growth Rate*

HERFI : *Herfindahl Index for Industry*

HERFR : *Herfindahl Index for Region*

COLFIR : *Collateral of firm*

COLIND : *Collateral of household*

$\eta_i$  : profil bank (konstan)

$\varepsilon_{it}$  : *random error*

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dirumuskan model berikut :

$$NPL = \alpha_1 GGDP_t + \alpha_2 INF_t + \alpha_3 SBI_t + \alpha_4 GLON_t + \alpha_5 LDR_t \quad (2.2)$$

Adapun model syariahnya adalah sebagai berikut :

$$NPF = \beta_1 GGDP_t + \beta_2 INF_t + \beta_3 SBI_t + \beta_4 GaPBY_t + \beta_5 FDR_t \quad (2.3)$$

Dimana:

NPL = *Non Performing Loan* Konvensional

NPF = *Non Performing Financing* Syariah

GGDP = *Growth of Gross Domestic Product* pada tahun t/sebelumnya

INF = *Inflasi* pada tahun t/sebelumnya

SBI = *Sertifikat Bank Indonesia* pada tahun t/sebelumnya

SWBI = *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia* pada tahun t/sebelumnya

GLON = *Pertumbuhan Kredit konvensional* pada tahun t/sebelumnya

GPBY = *Pertumbuhan Pembiayaan syariah* pada tahun t/sebelumnya

LDR = *Loan to Deposit Ratio* Konvensional pada tahun  $t$ /sebelumnya

FDR = *Financing to Deposit Ratio* Syariah pada tahun  $t$ /sebelumnya

Variabel waktu/kelambanan (*lag*) menjadi hal yang dipertimbangkan, karena menurut Gujarati (2003) suatu kondisi memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dari berbagai peristiwa ekonomi-sosial-politik yang terjadi.

Berkaitan dengan itu, penelitian lain menyebutkan, jika dihubungkan antara kegagalan variabel ekonomi dengan NPL, faktor yang mempengaruhi kredit pada perbankan konvensional, studi kasus di negara Malaysia, hasilnya sama dengan yang terjadi Indonesia, dimana variabel yang mempengaruhi kredit hanya variabel kredit periode sebelumnya (Syahrul, 2006).

Koopman dan Lucas (2003) meneliti tentang siklus bisnis dan default pada risiko kredit. Data yang digunakan adalah data-data *time series* USA tahun 1933-1997, yang meliputi data GDP riil, *credit spreads*, dan tingkat kegagalan bisnis. Data dibedakan menjadi dua tipe siklus yang mengarah pada periode, yaitu periode sekitar 6 tahun dan periode 11-16 tahun. Siklus perputaran antara GDP dan kegagalan bisnis utamanya timbul pada jangka waktu yang lebih lama. Penelitian-penelitian terkait dengan model-model empiris yang menghubungkan antara tingkat kegagalan terhadap variabel ekonomi makro telah banyak dilakukan. Dari hasil penelitian untuk sampel data yang paling lama, nampak siklus yang kuat antara *credit spread* dan GDP pada siklus bisnis 6 tahun. Pada siklus 11 tahun juga terdapat hubungan yang signifikan antara *default* (kredit macet) dan GDP.

#### **2.2.4. Faktor-faktor penyebab NPL dan NPF dari sisi Internal dan Eksternal Bank**

Lindiawatie (2007) melakukan penelitian mengenai Dampak Faktor Eksternal dan Internal Perbankan Syariah di Indonesia terhadap pembiayaan macet, dengan menggunakan analisa *Impulse Respon Function* (IRF) dan *Variance Decomposition* (VD). Berdasarkan analisis IRF dan VD diketahui bahwa faktor eksternal yaitu bunga, *shock* GDP dan inflasi, kecil berpengaruh dan dampaknya terhadap potensi kenaikan atau terjadinya pembiayaan macet pada perbankan syariah. Sedangkan faktor internal yang paling besar hubungannya adalah faktor modal yang ditunjukkan dengan besarnya NPF. Apabila terjadi *shock* pada modal, maka dampak terbesar adalah kebangkrutan. Selain itu

berdasarkan analisis *vector autoregressif* (VAR), data-data tahun sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan periode sekarang. Kesimpulan lain yang diperoleh yakni apabila terjadi peningkatan pembiayaan macet, maka akan terjadi *shock*/ perubahan besar pada faktor eksternal. Sedangkan hubungan faktor internal seperti modal, *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan pembiayaan dengan pembiayaan macet bersifat negatif, artinya peningkatan pembiayaan macet akan menurunkan modal, FDR dan pembiayaan.

Sedangkan dalam penelitian terhadap Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Mandiri Syariah (BSM), Wiliasih (2005) menyatakan, kasus pada BMI dalam jangka panjang terdapat hubungan dimana untuk setiap peningkatan 1% dari GDP akan meningkatkan 1.5% *non performing financing* di BMI. Sedangkan pada jangka pendek untuk variabel GDP, kenaikan 1% dari perubahan GDP 7 bulan yang lalu, akan meningkatkan rasio *non performing financing* sebesar 6.8%.

Studi kasus pada BSM, malah terdapat hubungan sebaliknya. Wiliasih menyatakan Untuk kasus BSM, dalam keseimbangan jangka panjang, variabel bebas yang diuji (GDP, tingkat profitabilitas, dan rasio alokasi pembiayaan murabahah) memiliki arah koefisien sebagaimana yang diharapkan, sesuai dengan hipotesis yang dibangun. Untuk variabel LGR yang merupakan representasi dari kondisi makroekonomi, pertumbuhan 1% GDP riil akan menurunkan nilai rasio *non performing loan* 10%. Sedangkan untuk hubungan jangka pendeknya dinyatakan variabel DLGR memiliki arah sesuai dengan yang diharapkan dimana peningkatan 1% perubahan GDP riil 7 bulan yang lalu, akan mengurangi NPF sebesar 8.5%. Namun nilai ini tidak signifikan secara statistik.